



---

## PANTANG LARANG KEPEMIMPINAN DALAM ALAM MELAYU

Hermandra<sup>1\*</sup>, Elmustian<sup>2</sup>, Putri Endang Kemalasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Riau

\*Penulis Korespondensi: [hermandra@lecturer.unri.ac.id](mailto:hermandra@lecturer.unri.ac.id), [elmustian@lecturer.unri.ac.id](mailto:elmustian@lecturer.unri.ac.id),  
[endangputri040404@gmail.com](mailto:endangputri040404@gmail.com)

**Abstract.** *Taboos in Malay culture represent a traditional value system that plays an important role in regulating social life, including leadership practices. These values not only function as normative prohibitions but also as cultural mechanisms that shape the character and ethics of leaders. In this context, taboos become part of the process of internalizing values that are passed down through generations in Malay society. This study focuses on understanding the forms, meanings, and functions of taboos in Malay leadership, particularly in relation to contemporary leadership dynamics. This study employs a qualitative approach with an emphasis on library research, utilizing various sources such as academic books, journals, and classical Malay literary works. The data obtained were then analyzed using a content analysis approach, aiming to identify and understand the various values embedded in these taboos. The findings show that taboos in Malay leadership encompass integrated moral, social, and spiritual dimensions. Values such as justice, wisdom, courtesy, and responsibility serve as the main foundation for building leadership with integrity. On the other hand, in the modern context, these values cannot always be applied literally, thus requiring contextual reinterpretation to remain relevant to contemporary developments. Therefore, taboos should not only be understood as cultural heritage but also as a source of ethical values that remain adaptive in present-day leadership practices.*

**Keywords:** *taboos, Malay leadership, ethics, local wisdom*

**Abstrak.** Pantang larang dalam budaya Melayu merupakan sistem nilai tradisional yang berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam praktik kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai larangan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang membentuk karakter dan etika pemimpin. Dalam konteks ini, pantang larang menjadi bagian dari proses internalisasi nilai yang berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Kajian ini berfokus pada pemahaman mengenai bentuk, makna, serta fungsi pantang larang dalam kepemimpinan Melayu, terutama dalam kaitannya dengan dinamika kepemimpinan masa kini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan, melalui pemanfaatan berbagai sumber seperti buku ilmiah, jurnal, serta karya sastra Melayu klasik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, dengan tujuan untuk menemukan serta memahami berbagai nilai yang terkandung dalam pantang larang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pantang larang dalam kepemimpinan Melayu mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang saling terintegrasi. Nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, kesantunan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas. Di sisi lain, dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara literal, sehingga memerlukan reinterpretasi yang kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Pantang larang tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai etis yang tetap adaptif dalam praktik kepemimpinan masa kini.

**Kata kunci:** pantang larang, kepemimpinan Melayu, etika, kearifan lokal

### 1. LATAR BELAKANG

Budaya Melayu dikenal sebagai salah satu sistem kebudayaan yang sarat dengan nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, baik melalui adat, tradisi lisan, maupun karya sastra klasik. Dalam sistem tersebut, pantang larang menempati posisi penting sebagai pedoman normatif yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial. Pantang larang tidak hanya dipahami sebagai larangan sederhana, melainkan

sebagai mekanisme kultural yang berfungsi dalam membentuk kesadaran moral dan etika masyarakat (Koentjaraningrat, 2009; Sulaiman, 2020).

Dalam konteks kepemimpinan, pantang larang memiliki peran yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan legitimasi moral seorang pemimpin. Kepemimpinan dalam tradisi Melayu tidak semata-mata diposisikan sebagai kekuasaan struktural, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial dan spiritual. Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” mencerminkan adanya integrasi antara nilai adat dan ajaran agama sebagai landasan utama dalam menjalankan kepemimpinan (Yusoff, 2012; Nasution, 2018).

Lebih lanjut, nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, kesantunan, dan tanggung jawab menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kepemimpinan Melayu. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga berperan sebagai pedoman etis yang mengarahkan perilaku pemimpin dalam menjaga keharmonisan sosial.

Dalam hal ini, pantang larang dapat dipahami sebagai sistem nilai yang secara implisit mengontrol perilaku pemimpin agar tetap berada dalam koridor budaya dan moral masyarakat (Milner, 2016; Hidayat, 2019).

Di tengah arus globalisasi yang membawa perubahan cepat dalam aspek sosial, politik, dan teknologi, relevansi pantang larang dalam praktik kepemimpinan mulai menghadapi tantangan. Modernisasi sering kali membawa nilai-nilai baru yang lebih rasional dan individualistik, sehingga tidak semua prinsip tradisional dapat diterapkan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap nilai-nilai pantang larang agar tetap kontekstual dan mampu beradaptasi dengan dinamika kepemimpinan modern (Rahman, 2021; Zulkarnain, 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, termasuk pantang larang, masih memiliki potensi besar sebagai sumber etika dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas di tengah krisis moral yang terjadi saat ini (Firmansyah, 2023; Lestari, 2022). Dalam konteks ini, pantang larang tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai strategi kultural dalam memperkuat karakter pemimpin yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk pantang larang dalam kepemimpinan Melayu, (2) apa

makna nilai yang terkandung di dalamnya, dan (3) bagaimana relevansinya dalam konteks kepemimpinan modern. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis berbagai aspek tersebut secara menyeluruh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun praktis, dalam pengembangan kajian kepemimpinan berbasis kearifan lokal.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pantang Larang dalam Perspektif Budaya Melayu**

Pantang larang merupakan bagian integral dari sistem nilai dalam budaya Melayu yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu dan kolektif. Secara konseptual, pantang larang tidak hanya dipahami sebagai larangan terhadap tindakan tertentu, tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang mengandung nilai simbolik dan edukatif. Dalam perspektif antropologi, pantang larang berperan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bekerja secara tidak langsung melalui internalisasi nilai dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2009; Sulaiman, 2020).

Lebih jauh, pantang larang memiliki fungsi pedagogis karena menjadi media transmisi nilai dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut disampaikan melalui ungkapan adat, peribahasa, maupun tradisi lisan yang sarat makna. Dalam konteks ini, pantang larang tidak bersifat koersif, melainkan persuasif, karena membentuk kesadaran individu melalui simbol dan makna yang dihayati secara kolektif (Abdullah, 1985; Wahyuni, 2021).

Dalam perkembangan kajian kontemporer, pantang larang juga dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang memiliki relevansi dalam menghadapi dinamika sosial modern. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi yang berpotensi menggeser norma budaya lokal (Putra, 2020; Firmansyah, 2023). Dengan demikian, pantang larang tidak hanya menjadi warisan tradisional, tetapi juga memiliki fungsi adaptif dalam menjaga identitas budaya masyarakat Melayu.

### **Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Melayu**

Kepemimpinan dalam perspektif Melayu tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan religius yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Berbeda dengan konsep kepemimpinan modern yang sering menekankan aspek struktural dan manajerial,

kepemimpinan Melayu lebih menitikberatkan pada dimensi moral dan etika. Seorang pemimpin tidak hanya diposisikan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai teladan yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial (Iskandar, 2001; Hidayat, 2019).

Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menunjukkan adanya integrasi antara adat dan agama dalam membentuk sistem kepemimpinan. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bersumber dari kekuasaan formal, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual (Yusoff, 2012; Nasution, 2018).

Selain itu, kepemimpinan Melayu menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Pemimpin diharapkan mampu menjalankan perannya secara adil, bijaksana, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bersama (Milner, 2016; Zulkarnain, 2022).

Dengan demikian, konsep kepemimpinan Melayu dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan berbasis nilai (*value-based leadership*) yang menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan.

### **Pantang Larang sebagai Sistem Etika Kepemimpinan**

Dalam konteks kepemimpinan, pantang larang berfungsi sebagai sistem etika yang mengatur perilaku pemimpin agar tetap berada dalam koridor nilai budaya dan moral masyarakat. Pantang larang tidak hanya membatasi tindakan yang dianggap tidak pantas, tetapi juga membentuk standar perilaku yang ideal bagi seorang pemimpin. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab menjadi bagian dari prinsip yang harus dijunjung tinggi (Alatas, 1990; Rahman, 2021).

Secara teoretis, pantang larang dapat dipahami sebagai bentuk etika normatif yang berfungsi mengarahkan tindakan individu berdasarkan standar moral tertentu. Namun, dalam praktiknya, pantang larang juga memiliki dimensi kontekstual yang memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman (Hidayat, 2019; Lestari, 2022).

Di sisi lain, dalam konteks modern, muncul tantangan terhadap penerapan pantang larang sebagai sistem etika. Perubahan sosial yang cepat serta berkembangnya nilai-nilai individualistik sering kali menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara pandang

terhadap norma tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan reinterpretatif agar pantang larang tetap relevan tanpa kehilangan esensi nilai yang dikandungnya (Rahman, 2021; Firmansyah, 2023).

Dengan demikian, pantang larang dapat diposisikan tidak hanya sebagai aturan tradisional, tetapi juga sebagai sistem etika yang dinamis dan adaptif dalam membentuk kepemimpinan yang berintegritas di era kontemporer.

### **3. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan studi kepustakaan sebagai sumber utama data. Fokusnya diarahkan pada penelusuran dan pemahaman nilai-nilai pantang larang dalam kepemimpinan Melayu secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena kajian tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami makna, menafsirkan nilai, serta melihat bagaimana konstruksi budaya terbentuk melalui berbagai sumber tekstual (Creswell, 2016; Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam kajian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, terutama buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta karya sastra Melayu klasik yang mengandung nilai-nilai pantang larang. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan referensi mutakhir untuk melihat perkembangan kajian terkait kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam konteks modern (Firmansyah, 2023; Lestari, 2022).

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, memilih, serta mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini tidak hanya bersifat pengumpulan data, tetapi juga melibatkan penilaian kritis terhadap relevansi dan kredibilitas sumber, sehingga data yang digunakan memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan (Zed, 2014).

Analisis data dalam kajian ini dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan tujuan menelusuri, mengelompokkan, serta memaknai nilai-nilai yang terdapat dalam pantang larang kepemimpinan Melayu. Proses analisis berlangsung secara bertahap, dimulai dari pemilahan data yang relevan dengan fokus kajian, kemudian penyajian dalam bentuk uraian deskriptif-analitis, hingga pada tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan secara sistematis..

Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan pendekatan interpretatif dengan menekankan pada pemaknaan kontekstual terhadap nilai-nilai budaya yang dikaji. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi pantang larang dalam praktik kepemimpinan Melayu di era kontemporer.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Klasifikasi Pantang Larang dalam Kepemimpinan Melayu**

Dari berbagai sumber yang dianalisis, terlihat bahwa pantang larang dalam kepemimpinan Melayu tidak berdiri sebagai aturan tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan yaitu moral, sosial, dan spiritual. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam membentuk kerangka etika kepemimpinan yang utuh. Dari sisi moral, pantang larang menekankan pentingnya menghindari perilaku seperti ketidakadilan, kebohongan, serta penyalahgunaan kekuasaan. Secara sosial, pantang larang berfungsi mengatur hubungan antara pemimpin dan masyarakat agar tetap harmonis melalui prinsip musyawarah dan kolektivitas. Sementara itu, dimensi spiritual menegaskan pentingnya tanggung jawab pemimpin terhadap nilai-nilai agama dan amanah yang diemban.

Temuan ini menunjukkan bahwa pantang larang tidak sekadar berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang terstruktur dan berlapis. Dengan demikian, klasifikasi ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan Melayu dibangun di atas fondasi etika yang bersifat multidimensional.

##### **Nilai-Nilai Fundamental yang Membentuk Etika Kepemimpinan**

Selain klasifikasi bentuk, hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah nilai fundamental yang secara konsisten muncul dalam berbagai sumber, yaitu keadilan, kebijaksanaan, kesantunan, dan tanggung jawab (amanah). Nilai keadilan berfungsi sebagai dasar legitimasi kepemimpinan, sementara kebijaksanaan berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Kesantunan mencerminkan identitas budaya dalam perilaku pemimpin, sedangkan tanggung jawab menegaskan posisi kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan secara etis.

Menarik untuk dicermati bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada tataran ideal, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam menjaga kepercayaan masyarakat.. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan dalam perspektif Melayu tidak semata-mata diukur dari capaian administratif, melainkan dari konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai etika tersebut.

### **Relevansi Pantang Larang dalam Konteks Kepemimpinan Modern**

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pantang larang masih memiliki relevansi dalam konteks kepemimpinan modern, meskipun mengalami pergeseran dalam bentuk penerapannya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan tetap menjadi prinsip universal yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan kepemimpinan kontemporer, seperti krisis kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun demikian, tidak semua pantang larang dapat diterapkan secara literal dalam situasi modern yang lebih kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan proses reinterpretasi agar nilai-nilai tersebut tetap kontekstual tanpa kehilangan esensi budayanya. Temuan ini mengindikasikan bahwa pantang larang memiliki sifat adaptif, sehingga dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai tradisional dan tuntutan kepemimpinan modern.

## **PEMBAHASAN**

### **Klasifikasi Pantang Larang sebagai Kerangka Etika Multidimensional**

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pantang larang dalam kepemimpinan Melayu terbagi ke dalam dimensi moral, sosial, dan spiritual mengindikasikan adanya struktur etika yang bersifat multidimensional. Jika dikaitkan dengan pandangan Koentjaraningrat (2009), kondisi ini menunjukkan bahwa sistem nilai budaya memang tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam berbagai aspek kehidupan sosial, melainkan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 2009; Sulaiman, 2020).

Secara lebih mendalam, dimensi moral berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk integritas pemimpin, terutama dalam mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks modern, hal ini dapat dikaitkan dengan isu korupsi dan krisis etika kepemimpinan yang masih menjadi permasalahan global (Hidayat, 2019; Firmansyah, 2023). Sementara itu, dimensi sosial menekankan pentingnya musyawarah

dan keharmonisan, yang dalam perspektif kontemporer dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan partisipatif.

Sementara itu, dimensi spiritual memberikan landasan transendental bagi kepemimpinan, sehingga tanggung jawab pemimpin tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada nilai-nilai keagamaan. Dalam praktik modern, dimensi ini sering mengalami reduksi karena dominasi pendekatan rasional dan birokratis. Oleh karena itu, integrasi ketiga dimensi ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek etika, sosial, dan spiritual dalam kepemimpinan (Zulkarnain, 2022; Lestari, 2022).

Dengan demikian, klasifikasi pantang larang tidak hanya bersifat kategorisasi konseptual, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sistem etika kepemimpinan Melayu yang relevan untuk dianalisis dalam konteks kontemporer.

### **Internalisasi Nilai sebagai Fondasi Legitimasi Kepemimpinan**

Nilai-nilai fundamental yang ditemukan dalam penelitian, seperti keadilan, kebijaksanaan, kesantunan, dan tanggung jawab, menunjukkan bahwa kepemimpinan Melayu dibangun di atas fondasi etika yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik nyata (Yusoff, 2012; Rahman, 2021).

Dalam perspektif kepemimpinan modern, nilai keadilan berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sedangkan kebijaksanaan mencerminkan kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik. Kesantunan yang kerap dipandang sebagai nilai tradisional ternyata tetap relevan, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif serta menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis (Wahyuni, 2021; Arifin, 2019).

Namun demikian, tantangan utama terletak pada proses internalisasi nilai tersebut, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin individualistik. Nilai-nilai yang sebelumnya diwariskan melalui tradisi lisan kini menghadapi tantangan akibat perubahan pola komunikasi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi reinterpretasi dan kontekstualisasi agar nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan modern (Putra, 2020; Nasution, 2018).

Dengan demikian, internalisasi nilai tidak hanya menjadi aspek kultural, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi dan keberlanjutan kepemimpinan.

### **Relevansi dan Adaptasi Pantang Larang dalam Kepemimpinan Modern**

Relevansi pantang larang dalam kepemimpinan modern menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan mengalami proses adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa kearifan lokal tetap memiliki peran strategis dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas di tengah krisis moral global (Firmansyah, 2023; Lestari, 2022).

Dalam praktiknya, nilai-nilai pantang larang dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi kebijakan, komunikasi yang etis, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa esensi pantang larang tetap relevan, meskipun bentuk implementasinya mengalami perubahan. Dengan kata lain, pantang larang tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan kontekstual (Rahman, 2021; Zulkarnain, 2022).

Di sisi lain, perlu diakui bahwa tidak semua aspek pantang larang dapat diterapkan secara literal dalam sistem kepemimpinan modern yang kompleks dan berbasis teknologi. Beberapa nilai memerlukan reinterpretasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan rasionalitas. Dalam konteks ini, pantang larang harus dipahami sebagai sumber nilai, bukan sebagai aturan yang kaku (Hidayat, 2019).

Dengan demikian, relevansi pantang larang terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensi, sehingga dapat menjadi jembatan antara nilai tradisional dan kebutuhan kepemimpinan kontemporer.

## **5. KESIMPULAN**

Dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan, bisa dilihat bahwa pantang larang dalam kepemimpinan Melayu bukan sekadar aturan lama yang kaku, tetapi justru menyimpan nilai-nilai yang masih relevan sampai sekarang. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan ternyata sudah lama tertanam dalam budaya ini, hanya saja disampaikan dengan cara yang lebih simbolik dan kontekstual.

Dalam praktiknya, pantang larang berfungsi sebagai semacam “rem sosial” yang menjaga pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang. Larangan-larangan tersebut secara tidak langsung membentuk karakter kepemimpinan yang lebih etis dan berorientasi

pada kepentingan bersama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu sejak dulu sudah memiliki sistem nilai yang cukup matang dalam mengatur perilaku pemimpinnya.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pantang larang tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk kearifan lokal yang bisa dikontekstualisasikan dalam kepemimpinan modern. Di tengah banyaknya krisis moral dalam kepemimpinan saat ini, nilai-nilai ini justru bisa menjadi alternatif pendekatan yang lebih humanis dan berakar pada budaya sendiri.

## **6. SARAN**

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati yang bisa jadi bahan pertimbangan ke depan. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, kajian tentang pantang larang dalam kepemimpinan masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih luas. Misalnya dengan pendekatan yang berbeda seperti kajian interdisipliner atau perbandingan dengan budaya lain, supaya hasilnya bisa lebih kaya dan mendalam.

Kedua, bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Bahasa Indonesia dan budaya, nilai-nilai pantang larang ini sebenarnya bisa dijadikan bahan ajar yang menarik. Tidak hanya dipahami sebagai bagian dari materi budaya, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam membentuk karakter siswa, khususnya yang berkaitan dengan etika dan kepemimpinan. Ketiga, bagi para pemimpin atau calon pemimpin, tidak ada salahnya mulai melirik kembali nilai-nilai lokal seperti ini. Di tengah arus modernisasi, justru nilai tradisional sering kali menawarkan perspektif yang lebih bijak dan bumi.

Terakhir, penting juga ada upaya pelestarian terhadap pantang larang sebagai bagian dari warisan budaya Melayu. Jika tidak didokumentasikan dan dikaji secara serius, dikhawatirkan nilai-nilai ini akan semakin terpinggirkan oleh perkembangan zaman.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, T. (2021). *Budaya Melayu dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad, Z. (2022). Nilai budaya dalam kepemimpinan Melayu. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(2), 112–125.
- Azra, A. (2020). *Tradisi dan Modernitas dalam Perspektif Melayu*. Jakarta: Kencana.
- Bakar, O. (2021). Ethics in Malay leadership. *Asian Culture Journal*, 12(1), 45–60.
- Effendy, T. (2020). *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu.
- Hamid, A. (2023). Local wisdom and leadership ethics. *Journal of Social Studies*, 8(1), 55–70.

- Hasanah, U. (2022). Pantang larang sebagai kontrol sosial. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 10(2), 101–115.
- Iskandar, M. (2021). Kepemimpinan berbasis budaya lokal. *Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 33–47.
- Karim, A. (2023). Nilai moral dalam tradisi Melayu. *Jurnal Humaniora*, 11(2), 89–104.
- Latif, Y. (2020). Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan. Jakarta: Kompas.
- Mahmud, R. (2024). Pantang larang dan etika sosial. *Jurnal Antropologi*, 14(1), 67–82.
- Nasution, H. (2021). Budaya dan kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan*, 7(2), 120–134.
- Putra, D. (2022). Local wisdom in leadership practices. *International Journal of Culture*, 5(1), 77–90.
- Rahman, F. (2023). Kepemimpinan Melayu modern. *Jurnal Kepemimpinan*, 3(2), 50–65.
- Sari, N. (2021). Tradisi dan nilai sosial. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(1), 22–36.
- Syafii, M. (2024). Transformasi nilai budaya. *Jurnal Kebudayaan*, 15(1), 91–105.
- Wahyuni, S. (2022). Etika kepemimpinan berbasis lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 140–155.
- Yusoff, M. (2020). Malay leadership values. *Asian Leadership Review*, 9(1), 30–44.
- Zulkarnain. (2023). Pantang larang dalam masyarakat Melayu. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(2), 66–80.
- Zainal, R. (2024). Budaya Melayu dalam era globalisasi. *Jurnal Global Culture*, 4(1), 15–29.